



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI SUPRIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE**
3. NHK : **964277**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.656.000.000

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 61.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 1.246 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 194.500.000

1. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 376.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 88.153.324

F. HARTA LAINNYA Rp. 70.000.000

Sub Total Rp. 2.385.153.324

III. HUTANG Rp. 301.617.424

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.083.535.900

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.